

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PASANGAN HUSEIN BERBUDHI

#### A. Profil Pasangan Husein Berbudhi



**Gambar 2.1 : Gambar profil Husein Berbudhi**  
Sumber : Sekretariat DPC PDIP Kab. Banyumas

#### B. Visi Misi Pasangan Husein Berbudhi

Dalam merumuskan visi misinya, Pasangan Husein Berbudhi melihat bahwa, tantangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan otonomi daerah ke depan adalah adanya arus globalisasi dan tuntutan akan terwujudnya *good governance*. Terkait dengan hal tersebut, Pemda akan dihadapkan pada 5 (lima) isu besar, yaitu; demokratisasi, perlindungan HAM, perdagangan bebas, pengentasan kemiskinan, anti korupsi dan pelestarian Lingkungan Hidup. Isu-isu tersebut akan selalu bersinggungan

Dengan kata lain, Pemda ke depan haruslah bisa mengelola potensi-potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang di miliki serta bisa menggunakan kewenangan-kewenangan yang dijamin dalam undang-undang untuk melakukan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan langkah-langkah cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat untuk bisa mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan hubungan Pemda dan masyarakat dapat tegak di atas prinsip keadilan, kesedarajatan, dan otonomi. Kerangka tersebut akan mendorong partisipasi publik yang tinggi, sekaligus menjadikan Pemda mampu mengakomodasi tuntutan publik.

Untuk itu, dalam pelaksanaan pemerintahan, Pemda Banyumas ke depan harus bisa memperhatikan pilar-pilar dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yaitu; *Pertama*, memupuk hubungan yang demokratis dan komunikatif dengan semua komponen masyarakat; *Kedua*, mengedepankan semangat kearifan local dan budaya kewirausahaan; dan *Ketiga*, harus berani melakukan inovasi, kreativitas dan terobosan-terobosan. Sehingga dengan demikian Pemda akan dapat melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, permasalahan dapat cepat diselesaikan, kehidupan demokrasi berkembang, masyarakat terbedayakan, perekonomian rakyat terdorong dan derajat kehidupan masyarakat akan membaik. Hal itulah yang akan menjadi tujuan besar dalam membangun

Banyumas dari pasangan bakal calon bupati Ir. Achmad Husein dan dr. Budi Setiawan (Husein-Berbudhi).

Berangkat dari latar belakang tersebut pasangan Husein Berbudhi merumuskan rancangan visi, misi dan program bagi pasangan Husein-berBudhi dalam Pilkada Banyumas 2013.

### **1.1 Visi:**

*Terwujudnya Pemerintahan Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa.*

### **1.2 Misi:**

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.
3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan.
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai.

Berangkat dari visi dan misi tersebut, pasangan Ir. Achmad Husein dan dr. Budi Setiawan membuat Strategi Umum Pembangunan Kabupaten Banyumas 2013-2018 :

***Pertama, Membangun Birokrasi yang bersih, efektif dan inovatif.***

Semangat otonomi daerah pada hakekatnya hendak mendekatkan publik dengan masyarakat agar masyarakat mampu mengontrol dan mengakses pengelolaan pemerintah agar dapat berjalan sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat daerah. Cermin pemerintah yang peduli rakyat dapat diukur dari pengelolaan kebijakan dan anggaran yang *pro* rakyat terutama rakyat kurang mampu.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu beranjak dari kemampuan pelayanan rutin menuju kemampuan berinovasi. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang ramping, cerdas dan kuat yang kemudian dapat memperkuat kapasitas birokrasi disimpul pelayanan terdekat dengan rakyat yaitu kecamatan. Oleh karena itu, penguatan dan pemberdayaan unit pemerintahan di tingkat kecamatan layak diutamakan

Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat dapat menjadikan kecamatan sebagai unit pemerintah terdekat yang menjangkau masyarakat desa.

Pemerintahan Kecamatan memiliki potensi untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong perekonomian, demokrasi, dan menjalankan fungsi penghubung antara masyarakat/pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya. Syaratnya adalah kepala daerah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dan didukung dengan penambahan sumber daya manusia, dukungan program, dan dukungan keuangan. Bagi aparatur daerah yang mendukung dan mampu berinovasi maka akan mendapatkan insentif baik secara personal maupun kelembagaan agar terbangun iklim kondusif bagi birokrasi untuk berprestasi.

***Kedua, Keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan Perkotaan dan Pedesaan.***

Corak pembangunan daerah Banyumas yang lalu adalah terbuai mimpi kota besar (metropolitan). Penyakit mental setiap kepala daerah yang sangat mendambakan simbol-simbol kemegahan fisik bertebaran di sekitar domisili kerja dan pusat kota kabupaten. Kondisi ini mengakibatkan memusatnya arus modal dan pembangunan di kawasan perkotaan, tidak munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru di desa serta perbedaan ekonomi dan kelangkaan akses bagi desa dari sarana yang

Oleh karena itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Banyumas akan membuat kebijakan yang mendorong keseimbangan dan keterkaitan pertumbuhan social ekonomi antara Perkotaan dan Pedesaan. Keseimbangan dalam aspek kelembangaan, ekonomi, infrastruktur dan pelayanan publik. Penjabaran rencana strategis ini akan dituangkan dalam beberapa program-program unggulan pedesaan yakni: meningkatkan kesejahteraan aparatur desa, meningkatkan jumlah ADD, memperbaiki infrastruktur desa kemudian mendorong pertumbuhan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Saatnya membangun desa sebagai sokoguru ekonomi daerah melalui pendirian BUMDes. BUMDes dibangun sebagai wujud kemandirian lembaga perekonomian desa. Keberadaan lembaga perekonomian ini diwarnai oleh wujud kesederhanaan “ke-lokal-an” desa, dibangun dengan prinsip “dari, oleh, dan untuk” masyarakat itu sendiri. Sejak dini dimaksudkan pula demi meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat desa itu sendiri. Hal yang penting adalah bahwa pengelolaan BUMDes sebagai ujung tombak perekonomian desa harus dilakukan secara profesional, kooperatif, kreatif dan mandiri. Dengan demikian, BUMDes dibangun sebagai lembaga komersial yang memiliki jiwa ke-lokal-an. Ini penting ditekankan sejak awal agar nantinya mampu membantu masyarakat ke luar dari setiap permasalahan yang dihadapi terutama dalam menghadapi kesulitan ekonomi di Pedesaan

**Ketiga, Meningkatkan lapangan kerja disertai peningkatan kemampuan masyarakat Menciptakan lapangan kerja.**

Pembelajaran pada masa lalu adalah gagalnya pemerintah daerah mewujudkan penyerapan lapangan kerja dengan bertumpu pada usaha industri yang padat modal dan teknologi. Pada penerapannya ternyata tidak mudah karena membutuhkan proses politik dan studi kelayakan yang sangat lama dan berujung pada kegagalan. Investasi sarat modal dan teknologi juga berakibat tersingkirnya angkatan kerja tidak terdidik dan terampil dan tergesurnya usaha rakyat yang bermodal kecil. Karena itu, perlu pembenahan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Banyumas.

Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas keterampilan tenaga kerja melalui berbagai kegiatan pelatihan. Pelatihan usaha kecil, perdagangan, perbengkelan, jasa adalah bentuk-bentuk usaha produktif yang murah dan mudah untuk diterapkan di daerah.

Pemerintah daerah juga harus menyediakan tata ruang yang strategis dan layak bagi pedagang kecil. Modal dan kerampilan tidak akan memiliki arti apa-apa jika pedagang kecil tidak dilindungi oleh pemerintah. Mereka selalu menjadi korban pembangunan karena setiap kali terdapat investasi di wilayah perkotaan selalu mengusir pedagang kecil. Idealnya, Kita membutuhkan investasi yang member tempat tersendiri

Inovasi selanjutnya adalah memperkuat upaya dinas ketenagakerjaan daerah mengiatkan program magang kerja dan kerjasama ketenagakerjaan dengan perusahaan. Magang dan kerjasama ini sangat berarti bagi generasi muda terampil dalam mengakses peluang-peluang kerja di kota-kota besar.

### **C. Program-program pasangan Husein Berbudhi**

Sebagai penjabaran dari rancangan Strategi Umum Pembangunan Kabupaten Banyumas 2013-2018 tersebut, Husein Berbudhi membuat beberapa program kerja, yaitu:

- a) Bidang Kesehatan
  - Pelayanan kesehatan gratis untuk pasien kelas III di RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH)
  - Memfasilitasi dan optimalisasi Program EMAS

Perbaikan infrastruktur air bersih melalui pembangunan PLUD



- Subsidi / beasiswa bagi siswa miskin sekolah SD-SMP-SMU / sederajat secara bertahap
- Bantuan subsidi untuk kegiatan pendidikan agama ditingkatkan

d) Bidang Ekonomi Kerakyatan:

- Membuat MARKETING BOARD produk-produk local dan potensi wisata
- Memfasilitasi dan membuat zonasi dan promosi bagi UMKM (seperti; zona makanan ringan/jajanan pasar, zona kerajinan dan bahan jadi) baik di pasar tradisional, mall dan ditempat terbuka strategis
- Satu kecamatan satu produk unggulan
- Badan Usaha Milik Desa (BUMNDesa)
- Dalam 2 tahun pasar-pasar tradisional sudah direvitalisasi secara fisik dan fasilitasnya.
- Kredit mikro untuk petani, penderes dan PKL
- Modal usaha untuk pesantren-pesantren
- Pelatihan wirausaha bagi keluarga TKI
- Pelatihan usaha kecil dan kreatif, serta pembinaan dan permodalan di bidang koperasi berbasis perempuan produktif dan ibu rumah tangga.

e) Bidang Pembangunan Pedesaan

- Peningkatan ADD untuk pembangunan pedesaan

Dalam 2 tahun jalan jalan kabupaten di desa sudah diperbaiki

- Peningkatan kualitas jalan desa
  - Keseimbangan pembangunan kawasan desa-kota
  - Membangun teknologi informasi di pedesaan
- f) Bidang ketenagakerjaan:
- Membuka program magang dan bursa tenaga kerja bagi generasi muda.
  - Pemberian bantuan alat kerja kepada kelompok-kelompok usaha produktif
  - Optimalisasi regulasi yang memudahkan tumbuhnya iklim investasi yang menyerap banyak tenaga kerja dan sumber daya alam daerah.
  - Membuat Perda perlindungan untuk TKI
  - Bagi investasi yang padat karya minimal menyerap 2000 tenaga kerja akan mendapatkan insentif kemudahan dalam perijinan dan perpajakan.
- g) Bidang Reformasi Birokrasi:
- Memperkuat kecamatan sebagai unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan public
  - Program JUMAT BERSIH
  - Restrukturisasi birokrasi berdasarkan kompetenstesi dan jenjang karir untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif

Membuat Sistem Informasi Penerima (SIMPEG) untuk rasionalisasi

- Reformasi sistem perijinan
- Pembatasan rotasi PNS agar tercipta iklim sejuk dan kondusif bagi berjalanya roda pemerintahan.

h) Bidang lingkungan

- Menciptakan kota hijau
- Percepatan dan penanganan penanggulangan banjir
- Menata dan membangun system sanitasi di perkampungan kumuh
- Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis kemandirian warga
- Perlindungan lahan pertanian produktif

i) Bidang Budaya, Wisata dan Olahraga:

- Membangun Gedung Kesenian yang representatif
- Optimalisasi promosi wisata alam dan budaya/adat
- Memberdayakan dan memfasilitasi aktivitas kelompok-kelompok seni dalam memajukan kesenian lokal Banyumas.
- Memfasilitasi peningkatkan prestasi cabang-cabang olahraga

j) Bidang Interaksi dan Pengawasan terhadap Pemerintah:

- Membuka rubrik warga setiap satu minggu sekali di *E-Govt* yang akan dijawab oleh kepala Dinas
- Melakukan dialog publik dengan warga dan pemangku kepentingan satu bulan sekali

Membuka *hotline* sms langsung ke Bupati yang menerima keluhan

- Membuat *hotline* sms aduan setiap layanan publik

Sumber : Tim Dokumentasi Husein Berbudhi

#### **D. Profil partai pendukung**

##### **1.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**

###### **a. Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini pertama kali berdiri pada tanggal 10 Januari 1999 dan berkantor pusat di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie, dalam rangka akan diselenggarakannya Pemilu 1999, PDI-P didirikan. Dalam Pemilu ini, PDI-P memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Walaupun demikian, PDI-P gagal membawa Megawati ke kursi kepresidenan, karena kalah suara dalam Sidang Umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid, dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden.

Pada 28 Maret 2005, Kongres II PDI-P dibuka di Sanur, Bali, di tengah aksi sekelompok kader yang meminta reformasi di dalam tubuh PDI-P dan terkumpul dalam "Gerakan Pembaruan PDI-P". Kongres ditutup pada 31 Maret, dua hari lebih cepat dari yang direncanakan,

... dan pemilihan kembali Megawati Saekamenutri secara aklamasi oleh

sekitar 1.000 utusan PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan periode 2005-2010 beserta sejumlah pengurus lainnya. Sadar akan tuntutan proses regenerasi kepemimpinan dalam tubuh Partai, Megawati menunjuk Pramono Anung Wibowo, seorang politisi muda, sebagai Sekretaris Jenderal. Sedangkan Guruh Sukarnoputra, adik Megawati, yang sebelumnya ikut dalam bursa calon Ketua Umum, terpilih sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Seluruh pengurus inti partai ini dapat dilihat di situs resmi PDIP, kini posisi Sekretaris Jenderal sudah digantikan oleh Tjahjo Kumolo yang didampingi oleh wakilnya Eriko Sotarduga.

Pencapaian pada Pemilu Anggota DPR 2009, PDI-P mendapat 95 kursi (16,96%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat 14.600.091 suara (14,0%). Dengan hasil ini, PDI-P menempati posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR. (<http://profil.merdeka.com/indonesia/p/partai-demokrasi-indonesia-perjuangan/>)

**b. Visi misi**

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub

Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas. Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas untuk:

**Pertama**, mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

**Kedua**, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.

**Ketiga**, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.

Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan

Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa.

Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila dan Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara. (<http://www.gatra.com/pemilu-profile-partai/25521-partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-pdip.html>, diakses pada tanggal 19

## **1.2 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

### **a. Sejarah Partai Perstuan Pembangunan (PPP)**

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII, Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti, Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR. PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas

Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah



tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: "Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden. Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP. Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH yang menjabat sejak

terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.

Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan,SH. Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung. (<http://ppp.or.id/page/ppp-dalam-lintasan-sejarah/index/>)

#### **b. Visi misi partai**

##### **Visi PPP**

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar. Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan. Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan kemandirian nasional (unit usaha keluarga/individual usaha swasta

badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marginalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat

PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

#### Misi PPP (Khidmat Perjuangan)

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai Islam.

PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

#### Misi PPP (Khidmat Perjuangan)

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan

mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, paham-paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, materialistis, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang

masih hidup di bawah garis kemiskinan. (<http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2013 pukul 21.51 WIB).

## **E. BEBERAPA KASUS *POLITICAL MARKETING* DI INDONESIA**

### **a. *Push Marketing* Hanafi Rais - Tri Harjun dalam meraih dukungan pada pemilihan umum walikota Yogyakarta 2011**

Hanafi Rais merupakan *new comers* di dunia perpolitikan Yogyakarta. Oleh karena itu belum banyak yang mengenalnya. Dalam survey awal hanya 7% yang mengenal Hanafi Rais. Untuk mengatasi hal tersebut, tim sukses Hanafi Rais melalui Hanafi Rais Centre melakukan strategi *political marketing* untuk mendapatkan dukungan masyarakat Yogyakarta.

Elemen *political marketing* yang digunakan adalah *push marketing*. Kegiatan yang dilakukan oleh tim Hanafi Rais terbagi menjadi beberapa kegiatan. Kegiatan yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dilakukan dengan mengadakan jalan santai, pengajian, lomba melukis dan mewarnai, wayangan dan campur sari. Kemudian kegiatan yang bertujuan untuk mencari simpati masyarakat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan, pembagian makanan pendamping ASI, pemeriksaan kesehatan dan senam lansia. Kegiatan untuk mempengaruhi pemilih dilakukan dengan melakukan kunjungan ke komunitas, dialog warga, dan personal selling.

Dalam pilwali Yogyakarta, walaupun Hanafi mengalami kekalahan, namun strategi *push marketing* cukup efektif untuk



mendongkrak suara. Pasangan HATI merupakan kandidat *incumbent* yang mendapatkan suara sebanyak 97.074 atau 48,3 persen sedangkan pasangan FITRI merupakan *new comers* mendapatkan 84.122 suara atau 41,9 persen. Selain *push marketing* tim Hanafi Rais juga melakukan elemen-elemen *political marketing* yang lain.

**b. Pemasaran Politik Drs. Suyoto, M.Si dan Drs. Letkol. (Purn.) Setyo Hartono dalam memenangkan Pilkada Langsung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Riyadi mengenai pemasaran politik Drs. Suyoto, M.Si dan Drs. Letkol. (Purn.) Setyo Hartono dalam memenangkan Pilkada Langsung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 faktor terkuat terletak pada strategi *push marketing* yang dilakukan oleh pasangan tersebut.

Pada Pilkada tahun 2007 pasangan Suyoto – Setyo Hartono merupakan pasangan yang didukung oleh PAN, PPP, dan PNBK dengan total jumlah kursi di parlemen sebanyak 7 kursi. Dukungan parlemen tersebut merupakan dukungan paling sedikit dibandingkan dengan pasangan-pasangan yang lain. Yang menarik adalah pasangan Suyoto – Setyo Hartono mampu membalikan keadaan dari prediksi yang sudah diperkirakan.

Hal yang paling membedakan dari pasangan tersebut terletak pada cara berkomunikasi langsung dengan masyarakat. *Push Marketing* yang

kepada masyarakat dan melakukan komunikasi persuasive kepada masyarakat. Selain *push marketing* elemen-elemen lain dalam *political marketing* juga diterapkan dalam masyarakat.